BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar dunia, posisi geografis Indonesia membentang pada koordinat 6'LU – 11.08' LS dan 95' BT – 141.45' BT dan terletak di antara dua benua, Asia di utara, Australia di Selatan, dan dua samudera yaitu Hindia di barat dan Pasifik di timur (Rakhmat, 2019). Dalam perspektif geopolitik, bentangan posisi geografis ini tentu saja menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki *bargaining power* dan *bargaining position* strategis dalam membangun hubungan antar bangsa, baik dalam lingkup kawasan maupun global. Hal tersebut berangkat dari definisi bahwa ruang merupakan inti dari geopolitik karena di sana merupakan wadah dinamika politik dan militer. Penguasaan ruang secara *de facto* dan *de jure* merupakan legitimasi dari kekuasaan politik (Satria, 2009). Bertambahnya ruang negara atau berkurangnya ruang negara oleh berbagai jenis sebab, selalu dikaitkan dengan kehormatan dan kedaulatan negara dan bangsa.

Posisi Indonesia terletak dipersimpangan jalan politik dan perdagangan dunia, membentang panjang dari Timur ke Barat serta melebar dari Utara ke Selatan. Posisi ini menempatkan Indonesia, secara geopolitik, menjadi penting bagi kawasan regional dan global, serta secara geostrategi, menjadikan Indonesia teramat vital bagi pertahanan negara-negara kawasan dan global untuk mengawal kepentingan nasionalnya masing-masing. Di sisi Indonesia, geopolitik dituangkan dalam suatu doktrin nasional yang disebut wawasan nusantara dengan politik luar negeri yang bebas aktif, dan geostrategi diwujudkan menjadi suatu konsep ketahanan nasional (kesatuan deologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan) (Surbakti, 2019). Suatu negara kepulauan, mempunyai kemampuan untuk menguasai laut, kemampuan ini digunakan untuk mengendalikan laut bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyatnya. Untuk itu, diperlukan kekuatan laut yang kuat dan handal, kekuatan laut merupakan sinergi semua unsur maritim

yang dipunyai bangsa dan negara, unsur-unsur tersebut (pemerintah, swasta dan rakyat) adalah berupa perdagangan, industri, pelayaran, perikanan, pelabuhan, jasa, pariwisata, kapal niaga, armada dan kapal perang. Sinergi tersebut sangat diperlukan sehingga laut dapat dimanfaatkan secara optimal dan memanfaatkan ruang laut untuk kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Laut merupakan alat pemersatu bangsa dan negara, bukan sebagai pemisah antar pulau-pulau, karena laut dapat digunakan untuk komunikasi dan transportasi, dapat dituai hasil kannya, dapat digali hasil tambangnya, dapat dimanfaatkan tenaganya, serta berbagai kegunaan lainnya (Utomo, 2010). Sehingga melalui laut, negara dapat mensejahterakan rakyatnya, memajukan perabadan bangsanya, bahkan membayar hutang-hutangnya. Untuk itu, arti penting dari laut harus digali lebih dalam lagi, serta disampaikan kepada generasi penerus bangsa Indonesia untuk disimak dan diterapkan bagi pertahanan dan kejayaan negaranya.

Friederich Ratzel menganggap pengaruh letak geografi (bentuk, luas, sumberdaya alam, sumberdaya manusai, letak) merupakan indikator tumbuh dan berkembangnya suatu negara (organisme hidup) (Smith, 1980). Ratzel meramalkan bahwa konstalasi politik dunia akan didominasi antara negara maritim dan kontinental dalam menguasai dunia bahkan menyebutkan bahwa Samudra Pasifik adalah kehidupan masa depan negara (Yani, 2007). Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo dengan munculnya kebijakan poros maritim yang menunjukan ciri khas orientasi model kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi (Fathun, 2016). Dengan bertumpu pada akses yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menginisiasi Jokowi untuk mengembalikan Indonesia kepada identitas semula sebagai negara kepulauan dengan basis budaya maritim wawasan nusantara disertai dengan segala kepemilikan potensi maritim terhadap lebih dari 17.000 pulau yang dimiliki Indonesia (Silalahi, 2016).

Gambar 1. 1 Peta laut Indonesia

Sumber: tribunnews.com

Kebijakan politik luar negeri Indonesia di era Jokowi terlihat jelas dari lembar visi dan misi pada halaman bahwa orientasi kebijakan politik luar negeri Jokowi pada geopolitik kelautan/maritim. Konsep ini mengadopsi teori geopolitik Alfred Thayer Mahan sebagai pelopor orientasi maritim yang membuktikan bahwa kekuatan laut merupakan instrumen negara untuk menguasai dunia dalam paradigma geopolitik maritim (Mahan, 2013). Terbukti dengan pengelolaan laut yang baik oleh Amerika Serikat sebagai orientasi kekuatan sumber ekonomi dan pertahanan negara dimasa itu. Keseriusan Jokowi untuk mengkapitalisasi potensi maritim nasional didukung oleh terbentuknya Badan Keamanan Laut melalui Instruksi Presiden no 178 tahun 2014 serta terbentuknya Kementrian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya RI sesuai Inpres nomor 10 tahun 2015. Terbentuknya dua intansi tersebut yakni Kementrian Koordinator Bidang Maritim yang membawahi empat kementrian yakni Kementrian ESDM, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Pariwisata, Kementrian Perhubungan sebagai tugas pokoknya. Sehingga, menjadi pertanda besar kepemimpinan Jokowi begitu peduli dengan isu maritim. Jokowi ingin melihat kembali wilayah maritim sebagai sumber kekuatan dan pendapatan nasional yang perlu di internasionalisasi.

Keseriusan Jokowi dalam mengembangkan geopolitik dalam bidang maritim juga terimplementasi dengan dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Sanjaya, 2018). Perpres tersebut berisi tentang pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga dibidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan pelaksanaan poros maritim dunia. Menurut Perpres tersebut, kebijakan kelautan Indonesia terdiri atas Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia dan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia. Kebijakan Kelautan Indoneisa sering juga disebut dengan Kebijakan Kelautan Nasional *(Ocean National Policy)* mampu memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pihak dalam melaksanakan pembangunan kelautan.

Bab IV poin kedua dari dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia menjelaskan bahwa perwujudan visi dan misi kelautan Indonesia harus berpegang teguh pada kepentingan nasional, serta keadilan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Menurut dokumen tersebut, Kebijakan Kelautan Indonesia disusun berdasarkan enam prinsip dasar, yaitu (Kebijakan Kelautan Indonesia, 2017):

(1) Wawasan Nusantara;
(2) pembangunan berkelanjutan;
(3) ekonomi biru;
(4) pengelolaan terintegrasi dan transparan;
(5) partisipasi; dan
(6) kesetaraan dan pemerataan.

Kemudian, Kebijakan Kelautan Indonesia sendiri terdiri atas 7 (tujuh) pilar yang merupakan poin dalam menjalankan visi kemarittiman yang handal, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut;
3. Tata kelola dan kelembagaan laut;

4. Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan;
5. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut;
6. Budaya Bahari; dan
7. Diplomasi Maritim.

Gambar 1. 2 Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia

Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia merupakan penjabaran dari 7 (tujuh) pilar Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia yang didetailkan dalam beberapa program prioritas. Pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia dilakukan oleh kementerian dan lembaga sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Sedangkan pelaksanaan dan pemantauan Kebijakan Kelautan Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kebijakan Kelautan Indonesia secara berkala kepada Presiden disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman setelah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Perlu diketahui bahwa perencanaan yang terarah menjadi hal yang penting bagi keberlangsungan kebijakan negara. Konsep yang terencana kemudian dilanjutkan dengan diplomasi publik dapat dilihat dari sisi publik sebagai obyek dan subyeknya. Diplomasi merupakan salah satu langkah penting bagi kehidupan bernegara. Sebelumnya, dalam kebijakan kelautannya, Indonesia pernah memperoleh prestasi diplomasi yang gemilang, yaitu ketika akhirnya konsep Indonesia diakui dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) (Suradinata, 2001). Konsep tersebut disetujui melalui Deklarasi Djuanda yang digunakan dalam berbagai perundingan termasuk perundingan perbatasan maritim Indonesia dengan negara lain. Hal tersebut merupakan peran geopolitik terhadap kebijakan diplomasi maritim Indonesia yang menjadi fokus pada penelitian ini.

Diplomasi antar negara dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, baik merupakan pembentukan kebijakan luar negeri dan terkait pelaksanaannya. Diplomasi dikatakan juga mencakup teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas wilayah yurisdiksi. Ketergantungan antar negara yang semakin tinggi yang kemudian menyebabkan semakin banyak jumlah pertemuan internasional dan konferensi internasional yang dilakukan sampai saat ini. Diplomasi juga diartikan sebagai suatu relasi atau hubungan, komunikasi dan keterkaitan (Djelantik, 2018). Selain itu diplomasi juga dikatakan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan untuk mencapai poltik luar negeri masing-masing Negara. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa diplomasi erat kaitannya dengan kebijakan suatu Negara, yang dalam penelitian ini yaitu terkait kebijakan kelautan Indonesia melalui kebijakan diplomasi maritim.

Maka dari itu, untuk mengembalikan Indonesia kepada identitas semula sebagai negara kepulauan yang makmur. Indonesia perlu menyadari akan pentingnya pemahaman geopolitik bagi perumusan kebijakan yang ada, dalam hal ini adalah geopolitik terkait kebijakan kelautan yang berupa diplomasi maritim. Sehingga

penulis tertarik untuk melakukan penelitian kedalam makalah ini yang berjudul **"Pengaruh Geopolitik terhadap Kebijakan Kelautan di Indonesia"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi kedalam suatu rumusan masalah, yaitu: "Bagaimana pengaruh geopolitik terhadap kebijakan kelautan (kebijakan diplomasi maritim) di Indonesia?"

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui informasi tentang bagaimana pengaruh geopolitik terhadap kebijakan kelautan (kebijakan diplomasi maritim) di Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun kontribusi tentang pengaruh geopolitik tehadap kebijakan kelautan di Indonesia.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA